

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- , 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT.Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Dicey, Albert V. 1952. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Mc Millan and Co, Limited St.Martin's Street.
- Dwiloka, Bambang. 2005. *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- MD., Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.

Puspa, Yan Pramadya. 2008. *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris*. Semarang: CV Aneka Ilmu.

Sirait, Ningrum N. 2003. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

-----, 2011. *Hukum Persaingan di Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.

Tamanaha, Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Dokumentasi

Kartasasmita, Ginandjar. *DEMOKRASI EKONOMI: Sebuah Tinjauan Institusional*. Materi Seminar "Hambatan Institusional Dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia (PERSADI), di Jakarta pada 18 Januari 1996. Dokumentasi & Arsip Bappenas Tahun 1996.

Likadja, Jeffry A. *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)"*. Universitas Hasanuddin: Jurnal Hasanuddin Law Review Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015.

Praningrum, Dyah H. Tri B., dan Arie S. *Karakteristik Imperatif dan Rekomendatif Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

Universitas Satya Wacana: e-Jurnal Refleksi Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016.

Sidharta, Bernard Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK): Jurnal Hukum Jentera Edisi 3-Tahun II November Tahun 2004.

Simbolom, Alum. *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Gajah Mada: Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 3 Tahun 2012.

Siswanto, Ade Hari. *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Tulisan Internal Kantor Hukum Hari Siswanto & Co. di Jakarta Tahun 2009.

Yusuf, Asep W. *Perlindungan Hukum (Rechtsbescherming) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Bahan Forum Hukum dan Organisasi "Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 24 September 2019*. Diakses dari http://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019133350.pdf pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 12.24 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Staatsblad Nomor 16 tahun 1848 tentang Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Wetboek van Strafrecht (Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.124/Pdt.G/KPPU/2018/PN.Jkt.Sel.;

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016.